

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEROMPIKAN OLEH TNI ANGKATAN LAUT (TNI AL) DI WILAYAH PERAIRAN KEPULAUAN RIAU

Oleh

Vanya Angel Valentine
NIM. 2105040131

Abstrak

TNI Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di Wilayah laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah disahkan. Perairan Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat rawan terjadinya tindak pidana perompakan sehingga perlu adanya penanganan yang khusus. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran dan hambatan TNI Angkatan Laut (TNI AL) dalam penegakan hukum tindak pidana perompakan di wilayah perairan Kepulauan Riau. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum Normatif-Empiris. Pelaksanaan Penegakan hukum terdiri dari deteksi dini dengan mengandalkan informasi intelijen dan komunikasi dengan kapal untuk mendeteksi potensi perompakan serta berkolaborasi dengan unsur komunitas maritim, pelayaran dan pelabuhan. Serta tindakan selanjutnya yang dilakukan seperti Pelaksanaan Penindakan terdiri dari Pengejaran Kapal, Penangkapan dan Penyelidikan Kapal, serta Penyerahan Perkara berikut tersangka dan barang bukti Kepada Instansi di Luar TNI AL yaitu POLRI. selanjutnya TNI AL memiliki *Tim Fleet One Quick Response (F1QR)* TNI Angkatan Laut (AL) unit khusus yang fokus kepada Penegakan hukum di laut. Hambatan dalam mengatasi tindak pidana perompakan meliputi kurangnya kerja sama internasional dan regional, perlunya sistem keamanan kapal yang memadai, dan keterbatasan yurisdiksi hukum. Selain itu, faktor ekonomi dan sosial serta kompleksitas wilayah operasi dan peran masyarakat. Faktor hambatan lainnya yaitu terkait Anggaran. Kapasitas kapal patroli dan radar pantai atau alat pendeteksi modern (seperti drone pengintai, *surveillance maritime satelit* atau system AIS untuk kapal kecil) masih terbatas. Saran dari penelitian ini yaitu meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara TNI Angkatan Laut dengan POLRI, merubah atau memperbarui Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009 dan Pemberdayaan masyarakat pesisir.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perompakan, Angkatan Laut

**LAW ENFORCEMENT OF THE CRIMINAL ACTS OF PIRACY BY THE
INDONESIAN NAVY (TNI AL) IN THE WATERS OF THE RIAU
ARCHIPELAGO**

By :

**Vanya Angel Valentine
NIM. 2105040131**

Abstract

The Indonesian Navy is tasked with enforcing the law and maintaining security in the maritime region in accordance with the provisions of national law and international law that have been ratified. The waters of the Riau Islands are an area that is very vulnerable to acts of piracy so that special handling is needed. The purpose of this study is to determine the role and obstacles of the Indonesian Navy (TNI AL) in enforcing the law on piracy in the waters of the Riau Islands. This type of research is Normative-Empirical legal research. Implementation of law enforcement consists of early detection by relying on intelligence information and communication with ships to detect potential piracy and collaborating with elements of the maritime, shipping and port communities. As well as further actions taken such as the Implementation of Enforcement consisting of Ship Chases, Ship Arrests and Investigations, and Handover of Cases including suspects and evidence to Agencies Outside the Indonesian Navy, namely the Indonesian National Police. Furthermore, the Indonesian Navy has a Fleet One Quick Response (FIQR) Team, a special unit that focuses on law enforcement at sea. Obstacles to overcoming piracy include a lack of international and regional cooperation, the need for an adequate ship security system, and limited legal jurisdiction. Furthermore, economic and social factors, as well as the complexity of operational areas and the role of the community, are also contributing factors. Another obstacle is the budget. The capacity of patrol vessels and coastal radars or modern detection equipment (such as surveillance drones, maritime satellite surveillance, or AIS systems for small vessels) remains limited. The research suggests improving coordination and cooperation between the Indonesian Navy and the Indonesian National Police (POLRI), amending or updating the Regulation of the Chief of Naval Staff Number Perkasal/32/V/2009, and empowering coastal communities.

Keyword : Law Enforcement, Piracy, Navy